

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjalankan pemberian penekanan kepada kewajiban pemerintah daerah agar dapat melaksanakan fungsi kewajibannya adalah pelayanan umum. Peningkatan pelayanan umum, yaitu pemda diharuskan mempunyai sumber pembiayaan yang banyak untuk dapat melakukan segala keperluan kebutuhan daerah. Pelaksanaan dalam otonomi daerah mengakibatkan pemberian tanggungjawab pembiayaan dan penyediaan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan desentralisasi. Pemerintah daerah didorong agar mengelola keuangan dengan sendiri agar mandiri. Dalam mengelola keuangan, pemerintah memakai instrument APBD.

Menurut penelitian Kuncoro (2014), sumber pendapatan daerah terdapat 3 komponen yang merupakan PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimana masing-masing komponen akan menunjang kegiatan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah yaitu salah satu penunjang utama pembiayaan daerah. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih diutamakan daripada dengan sumber yang berasal selain Pendapatan Asli Daerah. Menurut Wenny (2012) mengatakan bahawa pada intinya apabila suatu daerah mempunyai Pendapatan Asli Daerah cukup tinggi maka daerah otonomi

seakan semakin mandiri dalam melakukan penentuan kebutuhan pelayanan pada masyarakat.

Dana transfer atau akrab dinamakan dengan dana perimbangan ini memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam mengapai keefesiansian dan keadilan untuk menyediakan layanan publik (Halim, 2014). Dana perimbangan sangat dibutuhkan karena di samping keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, terdapat kebutuhan yang besar dalam pembiayaan pembangunan. Konsekuensinya, total penerimaan yang dikhususkan dari dana perimbangan dapat menyebabkan pemda kurang mandiri dalam menyelenggaraan pemerintahnya karena pemda lebih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dibanding PADnya.

Kesuksesan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam kinerja keuangannya. Keahlian daerah dalam menggapai tujuannya dapat dinamakan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk menggapai tujuan yang dikehendaki oleh daerah tersebut. Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio.

Dalam penelitian Julitawati (2012) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikansi terhadap kinerja keaungan daerah. Terbukti bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, artinya kalau setiap PAD naik sehingga dapat diikuti dengan peningkatan kinerja

keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wenny (2012) menyebutkan PAD yang sah secara dominan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan pajak daerah, redistribusi daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Beberapa penelitian tentang dana alokasi umum telah dilakukan dan hasilnya menurut Julitawati (2012) dalam penelitiannya menyatakan DAU dapat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tetapi tidak didukung oleh penelitian Febriansyah (2015) serta Swastika (2013) dan Hamara (2014) yang mengatakan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Artinya, semakin besar dana transfer maka akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal lain yang mempengaruhi kinerja keuangan ialah dana alokasi khusus (DAK). Beberapa penelitian tentang dana alokasi khusus telah dilakukan dan hasilnya menurut Julitawati (2012) serta Rukmana (2013) mengatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah (2015) serta Swastika (2013) dan juga Hamara (2014) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ketidak konsistenan dari hasil beberapa penelitian terdahulu memberikan motivasi untuk meneliti kembali pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini saya teliti dengan mengacu pada

penelitian Febriansyah (2015), perbedaan penelitian ini dengan penelitian Febriansyah (2015) adalah penelitian ini menggunakan periode tahun 2013-2015 di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian yang dilakukan Febriansyah (2015) menggunakan periode tahun 2011-2013 di Sumatera Bagian Selatan. Di Jawa Tengah mempunyai tatanan kota yang strategis dan memiliki luasnya potensi di daerah untuk memadati Pendapatan Asli Daerah. Tiap tahun, pemda di Jawa Tengah khususnya itu dapat menerima bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Setiap tahunnya jumlah masukan pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat. Tetapi pada kenyataannya, kenaikan pendapatan asli daerah tidak signifikan. Berdasarkan latar belakang penelitian maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Akankah PAD berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
2. Akankah DAU berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?
3. Akankah DAK berpengaruh positif signifikan pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris apakah mempengaruhi PAD pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Memberikan bukti empiris dapatkah mempengaruhi DAU pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.
3. Memberikan bukti empiris dapatkah mempengaruhi DAK pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada studi akuntansi dengan memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan aparat pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.